



SDGs Policy Analysis: Strategy Towards Sustainable Cities and Poverty Alleviation in Mojokerto Regency

Analisis Kebijakan SDGs: Strategi Menuju Kota Berkelanjutan Dan Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Mojokerto

Eddy Taufiq*

Universitas Airlangga, Indonesia

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of *Sustainable Development Goals* (SDGs) policies, especially the goal of zero poverty and hunger, in sustainable development in Mojokerto Regency. The method used is a qualitative approach through literature studies, by reviewing various written sources such as scientific articles, government reports, and policy documents. The results of the study indicate that the integration of SDGs in regional development planning has driven a decrease in poverty rates in Mojokerto, reflected in the decreasing trend in the percentage of poor people over the past five years. Innovative programs such as Kampung Zakat and MSME assistance have contributed significantly to improving community welfare. However, the implementation of SDGs still faces challenges in the form of budget constraints, low community participation, and lack of cross-sector synergy. Progress in poverty and hunger alleviation, the sustainability of achieving SDGs in Mojokerto requires strengthening collaboration, increasing human resource capacity, and optimizing funding.

Keywords: SDGs, Policy, Poverty, Mojokerto Regency

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan tanpa kemiskinan dan kelaparan, dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Mojokerto. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur, dengan mengkaji berbagai sumber tertulis seperti artikel ilmiah, laporan pemerintah, dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi SDGs dalam perencanaan pembangunan daerah telah mendorong penurunan angka kemiskinan di Mojokerto, tercermin dari tren penurunan persentase penduduk miskin selama lima tahun terakhir. Program inovatif seperti Kampung Zakat dan bantuan UMKM berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, implementasi SDGs masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, dan kurangnya sinergi lintas sektor. Kemajuan dalam pengentasan kemiskinan dan kelaparan, keberlanjutan pencapaian SDGs di Mojokerto memerlukan penguatan kolaborasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan optimalisasi pendanaan.

Kata Kunci: SDGs, Kebijakan, Kemiskinan, Kabupaten Mojokerto

OPEN ACCESS

ISSN 2338-445X (online)

ISSN 2527-9246 (print)

Edited by:

Hasniati

Reviewed by:

Tri Yuningsih and Sri Maryuni

*Correspondence:

Eddy Taufiq

eddytaufiq17@gmail.com

Published: 30 April 2025

Citation:

Taufiq, E. (2025). *SDGs Policy*

Analysis: Strategy Towards

Sustainable Cities and Poverty

Alleviation in Mojokerto

Regency.

JKMP (Jurnal Kebijakan dan

Manajemen Publik), 13:1.

doi: 10.21070/jkmp.v13i1.1810

PENDAHULUAN

SDGs (*Sustainable Development Goals*) merupakan serangkaian tujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di masa depan (Moyer & Hedden, 2020; Prabu Aji & Kartono, 2022). Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai Tahun 2030 (Shayan et al., 2022). SDGs mencakup berbagai aspek keberlanjutan diantaranya ekonomi, sosial, hingga lingkungan (Arcentales et al., 2022; Mensah, 2019). Di Indonesia, kebijakan SDGs diimplementasikan melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 (Presiden RI, 2017, 2022). Peraturan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak secara partisipatif. Kebijakan ini memerlukan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan keberhasilan implementasi SDGs, termasuk kolaborasi dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan guna mencapai target yang ditetapkan.

SDGs telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat, meskipun terpengaruh oleh faktor alam dan sosial (Bonnedahl et al., 2022; Niaz, 2022). Infrastruktur dan inovasi desa penting untuk menciptakan lapangan kerja layak dan peluang ekonomi baru mendukung SDGs (Khoiriah & Perbawati, 2023). Strategi pemerintah dalam mengintegrasikan SDGs, memperkuat infrastruktur desa, dan mendukung UMKM melalui digitalisasi telah membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif (Haqqi, 2023). SDGs berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mencapai target global dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh (Permatasari et al., 2021). Dengan itu, SDGs hadir meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia melalui integrasi infrastruktur desa, inovasi, dukungan UMKM, dan strategi pemerintah yang mendorong pembangunan berkelanjutan secara baik.



Gambar 1. Grafik Penurunan Kemiskinan Ekstrem Jawa Timur Tahun 2020-2024
 Sumber: Mojokertokota.go.id (2024)

Gambar 1 menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem sebesar 3,74 persen poin dari 4,40 persen (1.812.210 jiwa) pada 2020 menjadi 0,66 persen (268.645 jiwa) pada Maret 2024, capaian yang lebih baik dibandingkan penurunan nasional. Keberhasilan ini merupakan hasil konsistensi kebijakan terintegrasi selama lima tahun terakhir, termasuk program Jatim Satya yang fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong kemiskinan

melalui berbagai intervensi seperti PKH Plus, bantuan usaha, rehabilitasi rumah tidak layak huni, dan penyediaan fasilitas dasar di desa. Pemerintah juga menerima insentif fiskal Rp 6,2 miliar sebagai apresiasi atas pencapaian ini dan menargetkan kemiskinan ekstrem nol persen pada akhir 2024. Keberhasilan ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan pendekatan komprehensif dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan kebijakan tentu terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam mencapai tujuan SDGs. Penelitian oleh (Aryani & Nurhazana, 2024) menunjukkan bahwa tantangan utama pemerintah desa dalam mencapai SDGs meliputi keterbatasan finansial, rendahnya kapasitas SDM, kurangnya dukungan pemerintah pusat dan daerah, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Selain itu, (Handoko & Fitria, 2022) menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 memicu lonjakan angka kemiskinan dan menghambat progres pencapaian SDGs. Kajian (Aryani & Nurhazana, 2024) juga menyoroti keterbatasan sumber daya dan kapasitas SDM sebagai hambatan utama dalam pelaksanaan SDGs, serta pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Terakhir, penelitian (Aryani & Nurhazana, 2024; Capah et al., 2023) menekankan perlindungan lingkungan dan konservasi alam sebagai tujuan penting dalam implementasi SDGs Desa, dengan fokus pada penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Penelitian-penelitian terdahulu ini menunjukkan banyaknya tantangan yang dihadapi dalam mencapai SDGs di Indonesia serta perlunya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah tersebut.

Pemerintah daerah diharuskan untuk memetakan dan mengintegrasikan target serta indikator SDGs ke dalam agenda pembangunan daerah (RPJMD) dan mengalokasikan program serta anggaran yang selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Oleh karena itu, berbagai persoalan yang dihadapi bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan lebih banyak melibatkan peranserta dan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha, sehingga model manajemen pembangunan, harus mampu memobilisasi seluruh potensi, agar dapat diperoleh persepsi, pengertian, dan persetujuan dari berbagai pihak yang berkepentingan.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) merupakan wujud komitmen strategis Indonesia dalam mendukung agenda global pembangunan berkelanjutan. Perpres ini bertujuan untuk menyelaraskan pelaksanaan SDGs dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sekaligus memastikan keterlibatan berbagai pihak secara partisipatif, termasuk pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Pada tahun 2022, peraturan ini diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 untuk menyesuaikan strategi dan sasaran dalam menghadapi tantangan baru, menunjukkan komitmen pemerintah terhadap adaptasi kebijakan sesuai perkembangan global dan kebutuhan lokal. Prinsip pembangunan berkelanjutan yang diusung adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terencana tanpa membahayakan generasi mendatang. Dengan melibatkan berbagai pihak dan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam perencanaan pembangunan nasional, kebijakan ini menjadi landasan penting dalam menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan saat ini dan perlindungan masa depan.

Implementasi SDGs di Kabupaten Mojokerto, khususnya terkait pengentasan kemiskinan dan kelaparan, menghadapi sejumlah hambatan signifikan. Kendala utama meliputi keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang kompeten, rendahnya partisipasi masyarakat, serta minimnya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. Kajian (Phasa & Andriyus, 2024) menjelaskan bahwa rendahnya sosialisasi mengakibatkan masyarakat tidak aktif terlibat dalam program pembangunan berkelanjutan, sehingga mereka belum sepenuhnya menyadari peran penting mereka dalam pencapaian SDGs. Berdasarkan permasalahan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan SDGs dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Mojokerto.

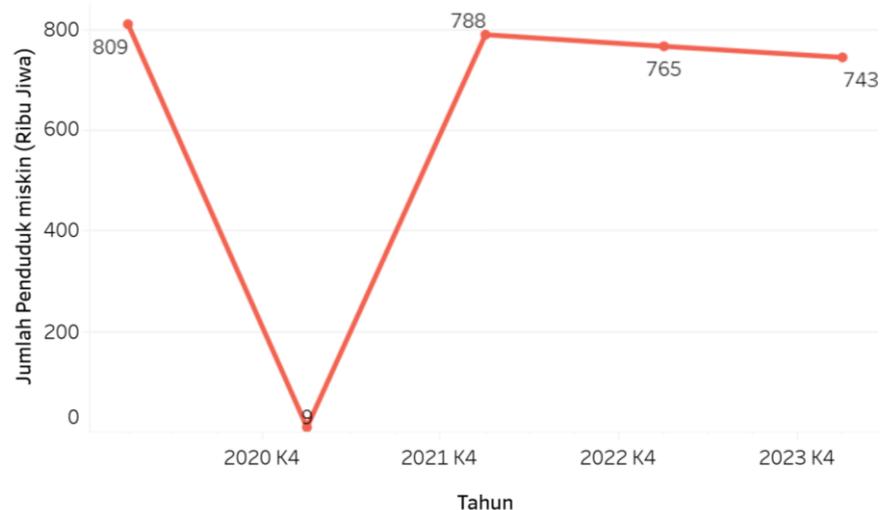
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk menganalisis kebijakan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Mojokerto. Metode studi literatur bertujuan untuk menggali dan merangkum informasi yang relevan dari berbagai sumber tertulis, termasuk artikel ilmiah, laporan pemerintah, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan implementasi SDGs. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengorganisir informasi yang diperoleh dari tinjauan literatur, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan SDGs. Penelitian ini juga mencakup analisis konteks sosial, ekonomi, dan lingkungan yang memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Data yang dikumpulkan disajikan dalam format terstruktur yang ringkas dan mudah diakses, sehingga memudahkan pemahaman mengenai situasi yang ada dan membantu menarik kesimpulan yang relevan. Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai efektivitas kebijakan SDGs dan kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Mojokerto, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Perubahan ini menekankan penggunaan studi literatur sebagai metode utama, sambil tetap mempertahankan fokus pada analisis kualitatif terkait kebijakan SDGs.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sustainable Development Goals (SDGs), atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, adalah 17 tujuan global yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 sebagai bagian dari Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. SDGs bertujuan untuk mengatasi tantangan global seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, dan kerusakan lingkungan, demi menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua. Setiap tujuan mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, dengan fokus pada penghapusan kemiskinan, akses pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, serta perlindungan ekosistem. Untuk mencapai SDGs secara efektif, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Implementasi SDGs sejalan dengan kebijakan dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 dan No. 111 Tahun 2022, yang menekankan integrasi SDGs dalam perencanaan pembangunan daerah.

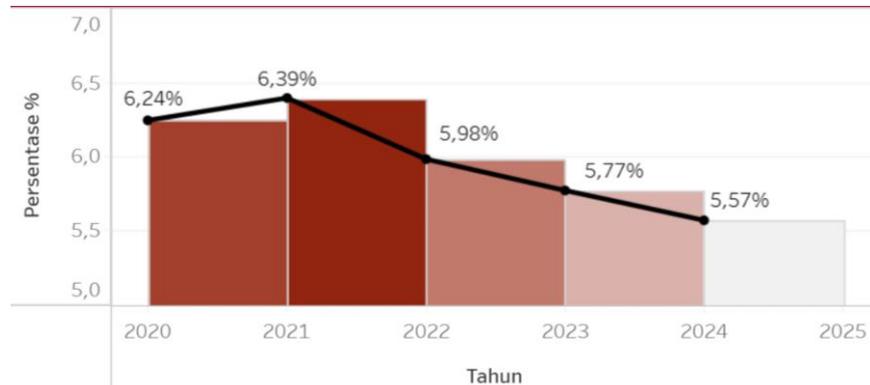
1. Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan



Gambar 2. Jumlah Penduduk Miskin Kota Mojokerto Tahun 2020-2024

Berdasarkan gambar 2, Kabupaten Mojokerto mengalami fluktuasi jumlah penduduk miskin dari tahun 2020 hingga 2024. Pada 2020, jumlah penduduk miskin tercatat 809 ribu jiwa, kemudian terjadi penurunan tajam yang tidak wajar pada 2021, diduga karena kesalahan pencatatan atau perubahan metode survei. Setelah itu, angka kemiskinan kembali naik menjadi 788 ribu jiwa pada 2022, sebelum menurun secara bertahap menjadi 765 ribu jiwa pada 2023 dan 743 ribu jiwa pada 2024. Meskipun terjadi fluktuasi, tren kemiskinan di Kabupaten Mojokerto secara umum menurun dalam lima tahun terakhir. Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat 9,37 persen, turun 0,43 poin dari tahun sebelumnya, menandakan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat setempat. Penurunan ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dan provinsi dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem, yang juga mengalami penurunan signifikan di Jawa Timur secara umum.

Namun, data tahun 2023 menunjukkan kenaikan jumlah penduduk miskin menjadi 112.860 jiwa, yang menandakan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi penurunan kemiskinan. Selain itu, tingkat partisipasi angkatan kerja di Mojokerto pada Agustus 2024 meningkat, dengan lebih banyak penduduk yang bekerja dan tingkat pengangguran menurun, yang dapat menjadi faktor pendukung penurunan kemiskinan secara bertahap. Kabupaten Mojokerto menunjukkan tren penurunan kemiskinan secara umum sejak 2020, meskipun terdapat fluktuasi dan tantangan di beberapa tahun. Penurunan ini didukung oleh peningkatan partisipasi angkatan kerja dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi, namun perlu perhatian berkelanjutan untuk mengatasi fluktuasi dan memastikan penurunan kemiskinan yang lebih stabil dan merata.



Gambar 3. Persentase Penduduk Miskin Kota Mojokerto Tahun 2020-2024

Gambar 3 menjelaskan bahwa tren persentase penduduk miskin di Kota Mojokerto selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang menarik. Pada 2020, persentase kemiskinan tercatat sebesar 6,24%, kemudian meningkat sedikit menjadi 6,39% pada 2021. Namun, sejak 2022, terjadi penurunan bertahap menjadi 5,98%, lalu 5,77% pada 2023, dan akhirnya mencapai 5,57% pada 2024. Analisis tren ini mengindikasikan bahwa meskipun sempat terjadi peningkatan kemiskinan pada 2021, kondisi sosial-ekonomi Kota Mojokerto mulai membaik secara konsisten setelahnya. Penurunan persentase kemiskinan selama tiga tahun terakhir mencerminkan efektivitas berbagai program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dan provinsi Jawa Timur dalam mengintegrasikan kebijakan sosial-ekonomi, seperti pemberian bantuan sosial, peningkatan akses pendidikan, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penurunan persentase penduduk miskin di Kota Mojokerto dari 2022 hingga 2024 menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam kondisi ekonomi masyarakat, menandai kemajuan dalam pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan di wilayah tersebut. Meski demikian, upaya perlu terus dilanjutkan agar tren positif ini dapat dipertahankan dan kemiskinan dapat ditekan lebih jauh lagi.

Program "Tanpa Kemiskinan" di Mojokerto menunjukkan bahwa dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan, kemiskinan ekstrem dapat ditekan secara signifikan. Program "Tanpa Kemiskinan" yang diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto bertujuan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem melalui berbagai inisiatif yang terintegrasi. Salah satu program kunci adalah Kampung Zakat

'Maslahah Sejahtera' yang dilaksanakan di Desa Tawangrejo. Program ini memanfaatkan dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan bantuan berupa hewan ternak, dana untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta pelatihan keterampilan. Dengan total anggaran Rp 308.390.000,- yang berasal dari kolaborasi antara pemerintah daerah, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kemenag, BAZNAS, dan masyarakat, program ini diharapkan dapat mengubah status mustahik menjadi muzakki.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 mencapai 9,37%, angka terendah dalam delapan tahun terakhir. Penurunan ini menunjukkan keberhasilan program-program pemerintah yang fokus pada pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah melaksanakan berbagai program dan inisiatif untuk mengurangi kemiskinan ekstrem, yang mencakup beberapa aspek penting. Pertama, pengurangan beban pengeluaran dilakukan melalui sistem distribusi bantuan sosial yang lebih efektif dan tepat sasaran, seperti pemberian beasiswa untuk pelajar berprestasi, bantuan iuran BPJS ketenagakerjaan, dan bantuan cadangan pangan. Contohnya, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diarahkan kepada masyarakat yang membutuhkan secara langsung membantu mengurangi beban ekonomi mereka. Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat difasilitasi melalui pelatihan keterampilan dan program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan digital marketing dan olahan makanan yang memungkinkan individu untuk mengembangkan usaha mereka. Program ini juga mencakup bantuan kepada kelompok usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan kapasitas mereka. Ketiga, akses kesehatan dan pendidikan ditingkatkan melalui pembangunan infrastruktur kesehatan seperti Instalasi Gawat Darurat (IGD) terpadu dan rehabilitasi ruang sekolah, yang secara langsung meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bawah garis kemiskinan. Terakhir, pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan, termasuk perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pelebaran jalan, dan pembangunan jembatan serta saluran irigasi, membuka akses ke pasar dan layanan dasar, sehingga membantu masyarakat menjadi lebih produktif dan mandiri. Dengan berbagai program ini, Kabupaten Mojokerto menunjukkan komitmen dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem secara holistik dan berkelanjutan.

Tabel 1. Strategi Implementasi Dan Tantangan Pelaksanaan SDGs Di Kabupaten Mojokerto

Aspek	Strategi Implementasi	Tantangan
Pemberdayaan Masyarakat	Program Kampung Zakat "Maslahah Sejahtera" di Desa Tawangrejo: bantuan hewan ternak, modal UMKM, pelatihan keterampilan.	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan akses pendidikan melalui beasiswa non tunai dan inovasi deteksi dini penyakit.	Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang kompeten.
Penguatan Ekonomi Lokal	Dukungan modal dan pelatihan UMKM, serta digitalisasi usaha untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan.	Kurangnya sinergi dan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, menyebabkan tumpang tindih program.
Infrastruktur Dasar	Penyediaan air bersih, sanitasi, dan transportasi untuk mendukung aksesibilitas dan kualitas hidup warga.	Akses infrastruktur dasar yang belum merata, terutama di wilayah perdesaan.

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Implementasi SDGs di Mojokerto telah selaras dengan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 dan No. 111 Tahun 2022 yang menekankan integrasi SDGs dalam perencanaan pembangunan daerah. Beberapa program utama yang berhasil dilaksanakan antara lain pengurangan kemiskinan melalui Kampung Zakat, peningkatan kesehatan lewat inovasi deteksi dini penyakit, dan peningkatan akses pendidikan berkualitas melalui bantuan beasiswa non tunai. Kabupaten Mojokerto menunjukkan komitmen kuat dalam mencapai SDGs, meskipun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, dan aksesibilitas layanan yang belum merata.

Tren data kemiskinan di Kabupaten Mojokerto dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi, namun secara umum mengalami penurunan. Pada 2020, jumlah penduduk miskin tercatat 809 ribu jiwa, turun menjadi 743 ribu jiwa pada 2024 dengan persentase kemiskinan mencapai 9,37%, angka terendah dalam delapan tahun terakhir. Penurunan ini didukung oleh kebijakan penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dan peningkatan partisipasi angkatan kerja, meskipun terdapat tantangan dalam menjaga konsistensi penurunan kemiskinan.

Program "Tanpa Kemiskinan" di Mojokerto, seperti Kampung Zakat ‘Maslahah Sejahtera’ di Desa Tawangrejo, memanfaatkan dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat melalui bantuan hewan ternak, modal UMKM, dan pelatihan keterampilan. Program ini berhasil meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dengan mengubah status penerima manfaat dari mustahik menjadi muzakki. Selain itu, pemerintah daerah juga mengoptimalkan bantuan sosial, penguatan UMKM, dan penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi untuk mendukung kesejahteraan warga.

Namun, pelaksanaan SDGs di Mojokerto masih menghadapi kendala utama berupa keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang kompeten, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. Pandemi COVID-19 juga sempat menghambat progres pencapaian SDGs dengan memicu lonjakan angka kemiskinan. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor dan peningkatan kapasitas SDM menjadi kunci keberhasilan implementasi SDGs ke depan.

Dengan itu, implementasi kebijakan SDGs di Kabupaten Mojokerto telah menunjukkan kemajuan positif, terutama dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Integrasi SDGs ke dalam perencanaan pembangunan daerah, didukung oleh program-program inovatif seperti Kampung Zakat dan penguatan UMKM, berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga mencapai titik terendah dalam beberapa tahun terakhir (Sharifi et al., 2024). Meski demikian, tantangan seperti keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, dan koordinasi antar pemangku kepentingan masih perlu diatasi. Untuk memastikan keberlanjutan pencapaian SDGs, diperlukan penguatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur dasar (Oktarina et al., 2023). Dengan strategi yang terintegrasi dan partisipatif, Kabupaten Mojokerto dapat terus maju menuju pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan efektif.

Tabel 2. Dimensi-dimensi SDGs di Kabupaten Mojokerto

Aspek	Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017	Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022	Implementasi Kebijakan
Tujuan Utama	Pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia.	Memperkuat pelaksanaan SDGs dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan sistematis.	Kabupaten Mojokerto menunjukkan komitmen dalam mencapai SDGs melalui berbagai program, seperti pengurangan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kualitas pendidikan serta kesehatan masyarakat.
Pendekatan	Mengintegrasikan SDGs ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah.	Mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.	Program-program seperti Kampung Zakat dan Bantuan Beasiswa Non Tunai menunjukkan kolaborasi antara pemerintah daerah

Aspek	Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017	Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022	Implementasi Kebijakan
			dan masyarakat untuk mengatasi isu sosial dan ekonomi.
Fokus Kebijakan	Menyasar semua aspek pembangunan berkelanjutan, termasuk sosial, ekonomi, dan lingkungan.	Memperkuat kelembagaan dan tata kelola dalam pencapaian SDGs.	Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan program kesehatan serta pendidikan di Mojokerto mencerminkan fokus pada aspek sosial dan ekonomi dari SDGs, dengan perhatian khusus pada peningkatan akses bagi masyarakat yang kurang beruntung.
Keberhasilan Program	Implementasi program-program SDGs yang terencana dan terukur di tingkat nasional.	Penyusunan rencana aksi daerah untuk mendukung pencapaian SDGs secara lokal.	Keberhasilan terlihat dari penurunan angka kemiskinan menjadi 9,37% pada tahun 2024, serta peningkatan akses pendidikan melalui program beasiswa dan fasilitas pendidikan gratis. Selain itu, program kesehatan seperti deteksi dini penyakit telah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan.
Tantangan yang Dihadapi	Koordinasi antar pemangku kepentingan yang masih perlu ditingkatkan.	Keterbatasan sumber daya dan pendanaan untuk mendukung implementasi kebijakan.	Tantangan di Mojokerto termasuk pencemaran lingkungan, kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi dan aksesibilitas layanan kesehatan yang masih rendah. Selain itu, disparitas dalam akses pendidikan di daerah terpencil juga menjadi isu yang perlu ditangani dengan program yang ada

Aspek	Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017	Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022	Implementasi Kebijakan
Rencana Tindak Lanjut	Memperkuat kolaborasi antar lembaga pemerintah dalam pelaksanaan SDGs.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program SDGs.	Rencana tindak lanjut termasuk penguatan inisiatif berbasis masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam program-program pembangunan serta pengembangan infrastruktur yang lebih baik untuk mendukung akses ke layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi layak. Upaya ini diharapkan dapat mengatasi tantangan yang ada dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara efektif.

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Tabel 2 menunjukkan bahwa Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 dan No. 111 Tahun 2022 menunjukkan bahwa kedua peraturan tersebut memiliki tujuan utama untuk memperkuat pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia, dengan fokus pada integrasi SDGs dalam perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Peraturan No. 59 menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan, sedangkan Peraturan No. 111 berfokus pada peningkatan kelembagaan dan tata kelola yang lebih baik. Kabupaten Mojokerto menunjukkan bahwa berbagai program yang dilaksanakan, seperti pengurangan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pendidikan, dan akses terhadap air bersih dan sanitasi layak, mencerminkan komitmen daerah dalam mencapai SDGs. Implementasi kebijakan SDGs di Kabupaten Mojokerto memiliki tantangan diantaranya koordinasi antar pemangku kepentingan, keterbatasan sumber daya, dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya SDGs masih perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan program-program ini. Rencana tindak lanjut yang mencakup penguatan inisiatif berbasis masyarakat dan pengembangan infrastruktur juga menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara efektif. Kajian (Aryani & Nurhazana, 2024; Lauda & Rachman, 2024; Moyer & Hedden, 2020) menunjukkan bahwa keberhasilan program-program SDGs di Mojokerto sangat dipengaruhi oleh kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. (Firman et al., 2024; Goals, 2024; Sharifi et al., 2024) menjelaskan bahwa kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan dan keterbatasan sumber daya tetap harus diatasi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh penggunaan E-Government terhadap Kabupaten Mojokerto dalam implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya dalam program-program yang berkaitan dengan pengurangan kemiskinan. Kebijakan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Kabupaten Mojokerto telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penurunan angka kemiskinan, baik secara jumlah maupun persentase, selama lima tahun terakhir menandakan efektivitas program-program terintegrasi seperti Kampung Zakat, bantuan sosial, penguatan UMKM, serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Namun, penelitian juga menyoroti adanya tantangan yang masih harus diatasi, seperti keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum meratanya akses infrastruktur dasar. Oleh karena itu, untuk menjaga keberlanjutan dan memperkuat pencapaian SDGs di masa mendatang, diperlukan penguatan sinergi lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi alokasi anggaran dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan daerah. Implikasi utama dari temuan ini adalah perlunya penguatan tata kelola, transparansi, serta inovasi dalam pelaksanaan program SDGs agar dampaknya lebih merata dan berkelanjutan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih aplikatif dan mendalam bagi pengambil kebijakan serta mendorong pencapaian target SDGs secara lebih efektif dan inklusif di Kabupaten Mojokerto maupun daerah lain di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian penelitian ini.

REFERENCES

- Aryani, & Nurhazana. (2024). Analisis Strategi Pemerintah Desa Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Di Kecamatan Rupa. *Jurnal IAKP*, 5(2).
- Bonnedahl, K. J., Heikkurinen, P., & Paavola, J. (2022). Strongly Sustainable Development Goals: Overcoming distances constraining responsible action. *Environmental Science and Policy*, 129(January), 150–158. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2022.01.004>
- Capah, B. M., Rachim, H. A., & Raharjo, S. T. (2023). Implementasi Sdg'S-12 Melalui Pengembangan Komunitas Dalam Program Csr. *Share : Social Work Journal*, 13(1), 150. <https://doi.org/10.24198/share.v13i1.46502>
- Del-Aguila-Arcentales, S., Alvarez-Risco, A., Jaramillo-Arévalo, M., De-La-cruz-diaz, M., & Anderson-Seminario, M. de las M. (2022). Influence of Social, Environmental and Economic Sustainable Development Goals (SDGs) over Continuation of Entrepreneurship and Competitiveness. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 8(2), 73. <https://doi.org/10.3390/joitmc8020073>
- Firman, F., Sumatono, S., Muluk, M. R., Setyowati, E., & Rahmawati, R. (2024). Enhancing Citizen Participation: The Key To Public Service Transparency. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12, e2937. <https://doi.org/10.55908/SDGs.v12i1.2937>
- Goals, S. D. (2024). Peringkat Kinerja Keseluruhan dari 193 Negara Anggota PBB. *SGDs Transformation Center*. <https://dashboards.sdindex.org/rankings>
- Handoko, C. T., & Fitria, S. (2022). Refleksi Pandemi Covid-19 dalam Akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *ENVIRO: Journal of Tropical Environmental Research*, 24(1), 22. <https://doi.org/10.20961/enviro.v24i1.65042>
- Haqqi, H. (2023). The Government's Policy in Encouraging the Global Competitiveness of Indonesian MSMEs through the Digital Ecosystem. *Journal of Economics, Management and Trade*, 29(8), 66–76. <https://doi.org/10.9734/JEMT/2023/v29i81115>
- Khoiriah, S., & Perbawati, C. (2023). The Role of the Village Towards Sustainable Development Goals. *Atlantis Press SARL*. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-046-6_97
- Lauda, M. M. R. R. S., & Rachman, I. F. (2024). Peran Literasi Digital Dalam Mewujudkan Desa Cerdas Dan Sgds 2030 Pada Era Disruptif. *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 186–197. <http://jurnalisticomah.org/index.php/merdeka/article/view/1307%0Ahttps://jurnalisticomah.org/index.php/merdeka/article/download/1307/1088>
- Mensah, J. (2019). Sustainable development: Meaning, history, principles, pillars, and implications for human action: Literature review. *Cogent Social Sciences*, 5(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2019.1653531>
- Moyer, J. D., & Hedden, S. (2020). Are we on the right path to achieve the Sustainable Development Goals? *World Development*, 127, 104749. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104749>
- Niaz, M. U. (2022). Socio-Economic development and Sustainable Development Goals: a roadmap from vulnerability to sustainability through financial inclusion. *Economic Research-Ekonomska Istrazivanja*, 35(1), 3243–3275. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2021.1989319>
- Oktarina, A., Pertiwi, C., Paluseri, A. R. A., Fazri, M., Nababan, F. E., Roidatua, M. R., & Imron, D. K. (2023). Smart Governance in Indonesian Village Towards SDGs Achievement. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 8(1), 107–122. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v8i1.39168>
- Permatasari, P., Ilman, A. S., Tilt, C. A., Lestari, D., Islam, S., Tenrini, R. H., Rahman, A. B., Samosir, A. P., & Wardhana, I. W. (2021). The village fund program in indonesia: Measuring the effectiveness and alignment to Sustainable Development Goals. *Sustainability (Switzerland)*, 13(21). <https://doi.org/10.3390/su132112294>
- Phasa, N. P., & Andriyus. (2024). Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Pandau Jaya. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 1(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jmp.18258>
- Prabu Aji, S., & Kartono, D. T. (2022). Kebermanfaat Adanya Sustainable Development Goals (SDGs). *Journal of Social Research*, 1(6), 507–512. <https://doi.org/10.55324/josr.v1i6.110>
- Presiden RI. (2017). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 11(1), 1–12.
- Presiden RI. (2022). Peraturan Presiden RI. No. 111 Tahun 2022. Kementerian Sekretariat Negara RI, 124956, 1–11.
- Sharifi, A., Allam, Z., Bibri, S. E., & Khavarian-Garmsir, A. R. (2024). Smart cities and Sustainable Development Goals (SDGs): A systematic literature review of co-benefits and trade-offs. *Cities*, 146(October 2023), 104659. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2023.104659>
- Shayan, N. F., Mohabbati-Kalejahi, N., Alavi, S., & Zahed, M. A. (2022). Sustainable Development Goals (SDGs) as a Framework for Corporate Social Responsibility (CSR). *Sustainability (Switzerland)*, 14(3), 1–27. <https://doi.org/10.3390/su14031222>

Conflict of Interest Statement: The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2025 Eddy Taufiq. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.